LAPORAN PENDAHULUAN

KAJIAN PEMBANGUNAN EKONOMI TERPADU DI KOTA SOLOK 2021-2026

Kerjasama

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SOLOK
dengan
PUSAT STUDI KEUANGAN DAN PEMBANGUNANFAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
2021

DAFTAR ISI

Judul 1
BAB I 3
PENDAHULUAN 3
1.1. Latar Belakang 3
1.2. Dasar Hukum 4
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sasaran 5
1.5. Lokasi Kegiatan 6
1.6. Biaya dan Sumber Dana Kegiatan 6
1.7. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen 6
1.8. Ruang Lingkup 6
1) Lingkup Wilayah Studi 6
2) Lingkup Pekerjaan 6
3) Keluaran Pekerjaan 7
BAB II 8
KERANGKA KONSEPTUAL 8
2.1. Konsep Pembangunan Ekonomi 8
2.2. Konsep Ekonomi Inklusif 10
2.3. Konsep Indikator Pembangunan Ekonomi 12
2.4. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) 14
2.5. Teori Pembangunan Ekonomi Wilayah 21
2.6. Peran Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Perkonomian 24
BAB III 25
METODOLOGI 25
3.1. Pendekatan Pelaksanaan 25
3.2. Metode Pengumpulan Data 25
3.3. Pengolahan Data 26
3.4. Metode Analisa Data 26
3) Analisis Input – Output 27

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi khususnya dan pembangunan suatu daerah pada umumnya. Masalah-masalah yang melekat dalam pembangunan ekonomi seperti tingginya laju pertumbuhan angkatan kerja, terbatasnya lapangan kerja, dan masih tingginya angka kemiskinan menjadi faktor penghambat untuk percepatan pembangunan ekonomi. Salah satu upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi adalah dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang berasal dari dalam dan luar daerah yang diyakini akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, kondisi ini sangat disadari oleh pemerintah daerah Kota Solok.

Setiap daerah pada dasarnya mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah harus mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Sehingga akan dipahami bahwa tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.

Sesuai dengan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat 4 menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Oleh karena itu, kekuatan ekonomi dan tingkat kesejahteraan nasional sangat ditentukan oleh sejauh mana pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat daerah. Kesejahteraan yang merata bagi setiap lapisan masyarakat serta berkurangnya ketimpangan dalam masyarakat adalah tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi, dan perlu mengkoreksi kebijakan yang keliru. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Dua prinsip dasar pengembangan ekonomi daerah yang perlu diperhatikan adalah (1) mengenali ekonomi wilayah dan (2) merumuskan manajemen pembangunan daerah yang pro-bisnis.

Dalam RPJMD Kota Solok 2021-2026, misi pembangunan ekonomi daerah tercantum pada ke 2 (dua yaitu *Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berorientasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pada Potensi Unggulan Daerah Yang Berkelanjutan Dan Didukung Oleh Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*. Untuk mewujudkan misi ini dibutuhkan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang mampu mengintegrasikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah di Kota Solok sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Disamping itu, dalam pembangunan ekonomi mendatang, Kota Solok akan menghadapi persaingan ekonomi yang semakin tinggi dan peningkatan dinamika sosial masyarakat, ditambah lagi dengan adanya pandemi covid 19 yang berdampak tidak hanya pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga pada aspek sosial ekonomi masyarakat. Untuk menghadapi beberapa tantangan tersebut, upaya pembangunan ekonomi di segala bidang secara terintegrasi perlu disusun melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi terpadu. Pedoman tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan perekonomian Kota Solok, atas dasar inilah Kajian Pembangunan Ekonomi Terpadu di Kota Solok sangat diperlukan agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas.

1.2. Dasar Hukum

Adapun dasar hokum yang melandasi dilakukannya kajian ini, antara alin adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai Pengganti Permendagri Nomor 5 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari dilaksanakannya kajian Pembangunan Ekonomi Terpadu di Kota Solok adalah tersusunnya pedoman atau arah pola pembangunan ekonomi di Kota Solok dalam format keterpaduan lintas sektor yang dapat dijadikan acuan bagi pengembangan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Solok.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kajian ini adalah untuk memberi arah pembangunan ekonomi serta konsep, kebijakan dan rencana strategis yang akan menjadi dasar pembangunan ekonomi di Kota Solok dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yakni tahun 2021-2026 dan menyiapkan arah, strategi dan pola keterpaduan pembangunan ekonomi di Kota Solok.

1.4. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya pedoman atau arah pola pembangunan ekonomi di Kota Solok dalam format keterpaduan lintas sektor.
2. Terbentuknya arah pembangunan ekonomi serta konsep, kebijakan dan rencana strategis yang akan menjadi dasar pembangunan ekonomi di Kota Solok.
3. Tersedianya arah, strategi dan pola keterpaduan pembangunan ekonomi di Kota Solok dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

1.5. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan meliputi wilayah administratif Kota Solok yang terdiri dari 2 (dua) Kecamatan dan 13 (tiga belas) Kelurahan.

1.6. Biaya dan Sumber Dana Kegiatan

Biaya untuk pelaksanaan pekerjaan ini dialokasikan sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Solok.

1.7. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pejabat Pembuat Komitmen yaitu: Drs. Indrafelli, MM (Satuan Kerja Bidang Ekonomi Sosial dan Pemerintahan). Pengguna Barang dan Jasa kegiatan ini adalah OPD Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Kota Solok.

1.8. Ruang Lingkup

1) Lingkup Wilayah Studi

Kajian ini melingkupi seluruh wilayah Kota Solok dengan cakupan sebagai berikut:

1. Seluruh OPD di Kota Solok
2. Seluruh wilayah Kota Solok yang merupakan objek kajian

2) Lingkup Pekerjaan

Kajian ini melalui beberapa tahapan kegiatan yang terdiri dari:

1. Melakukan persiapan manajemen dan administrasi pengkajian.
2. Menyusun kebutuhan data/ informasi terkait.
3. Melakukan pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder.
4. Menganalisis dan membahas data dan informasi.
5. Penyusunan laporan pendahuluan.
6. Pembahasan Laporan pendahuluan oleh tim ahli dan tim teknis kajian.
7. Finalisasi Laporan Pendahuluan.
8. Pengumpulan data pendukung, baik data primer maupun sekunder.
9. Penyusunan laporan antara.
10. Pembahasan laporan antara oleh tim ahli dan tim teknis pengkajian.
11. Finalisasi laporan antara.
12. Penyusunan laporan akhir.

13. Pembahasan laporan akhir oleh tim ahli dan tim teknis pengkajian.
14. Finalisasi laporan akhir.
15. Menyusun ringkasan eksekutif.
16. Seminar hasil kajian.
17. Cetak dokumen publikasi.

3) Keluaran Pekerjaan

Keluaran (output) dari pekerjaan ini berupa 1 (satu) dokumen tentang analisis pembangunan ekonomi terpadu Kota Solok tahun 2021 – 2026 yang memuat konsep, kebijakan, persiapan arah, strategi, dan pola keterpaduan pembangunan ekonomi di Kota Solok dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Dokumen ini diharapkan nanti dapat memberikan rekomendasi dan menjadi referensi bagi Walikota Solok dan pengambil kebijakan lainnya di Kota Solok, khususnya terkait kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

BAB II
KERANGKA KONSEPTUAL

2.1. Konsep Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 2006). Menurut Todaro (2011), pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional. Proses tersebut melibatkan perubahan besar, yang mencakup perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pengertian di atas, suatu perekonomian dikatakan mengalami perkembangan jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, proses perkembangan atau pembangunan ekonomi dikatakan terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Oleh sebab itu, indikator keberhasilan utama pembangunan ekonomi suatu daerah dapat ditunjukkan oleh adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah semestinya mampu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi, dan perlu mengoreksi kebijakan yang kurang tepat. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional secara menyeluruh. Untuk itu ada dua prinsip dasar pengembangan ekonomi daerah yang perlu diperhatikan yaitu (Darwanto, 2002):

1) Mengenali ekonomi willayah; Isu-isu utama dalam perkembangan ekonomi daerah yang perlu dikenali adalah antara lain adalah perkembangan dan mobilitas penduduk, lapangan usaha potensial dan unggulan, kualitas lingkungan dan keterkaitan antar wilayah di daerah bersangkutan
2) Merumuskan manajemen pembangunan daerah yang pro-bisnis; Pemerintah daerah dan pengusaha adalah dua kelompok yang paling berpengaruh dalam menentukan corak pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah, mempunyai kelebihan dalam satu hal, dan tentu saja keterbatasan dalam hal lain, demikian juga pengusaha. Sinergi antara keduanya untuk merencanakan bagaimana ekonomi daerah akan diarahkan perlu menjadi pemahaman bersama. Pemerintah daerah mempunyai kesempatan membuat berbagai peraturan, menyediakan berbagai sarana dan peluang, serta membentuk wawasan orang banyak. Akan tetapi, pemerintah daerah tidak dapat terlalu banyak memasuki aktivitas dalam proses kegiatan ekonomi masyarakat secara berlangsung. Di sisi lain, para pelaku usaha mempunyai kemampuan mengenali kebutuhan masyarakat dengan berbagai insiatifnya, memenuhi kebutuhan

itu. Aktivitas memenuhi kebutuhan itu membuat roda perekonomian berputar, menghasilkan gaji dan upah bagi pekerja dan penerimaan pajak bagi pemerintah. Dengan pajak, pemerintah daerah berkesempatan membentuk kondisi agar perekonomian daerah berkembang lebih lanjut di masa mendatang.

Adapun prinsip-prinsip manajemen pembangunan yang pro-bisnis diantaranya adalah:

a. Menyediakan Informasi peluang investasi dan usaha secara terbuka kepada Pengusaha
b. Memberikan Kepastian dan Kejelasan Kebijakan terkait perizianan dan pengembangan usaha
c. Mendorong pengembangan usaha di daerah
d. Meningkatkan Daya Saing Pengusaha Daerah
e. Membentuk Ruang yang Mendorong Kegiatan Ekonomi Daerah

Menurut Suparmoko, 2001; Pemerintah daerah harus mampu merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan dengan baik, karena dengan mengetahui tujuan dan sasaran pembangunan, serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki suatu daerah, maka strategi pengembangan potensi yang ada akan lebih terarah dan strategi tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah atau siapa saja yang akan melaksanakan kegiatan usaha di daerah yang bersangkutan.

Oleh karena itu, dalam mempersiapkan strategi pengembangan potensi yang ada di daerah, perlu dilakukan langkah-langkah berikut ini:

1) Mengeidentifikasi sektor-sektor/lapangan usaha/ kegiatan usaha mana yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masingnya.
2) Mengidentifikasi sektor-sektor/lapangan usaha/ kegiatan usaha mana yang potensinya rendah untuk dikembangkan dan mencari faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya potensi sektor tersebut untuk dikembangkan.
3) Mengidentifikasi sumberdaya (faktor-faktor produksi) yang dimiliki, terutamna sumberdaya manusianya dan yang siap digunakan untuk mendukung perkembangan setiap sektor yang bersangkutan.
4) Menentukan sektor-sektor andalan yang selanjutnya dianggap sebagai potensi ekonomi yang patut dikembangkan di daerah yang bersangkutan.
5) Menentukan strategi yang akan ditempuh untuk pengembangan sektor-sektor andalan yang akan dapat menarik sektor-sektor lain untuk tumbuh (*Leadingg Sector*), sehingga perekonomian akan dapat berkembang dengan sendirinya (*self propelling*) secara berkelanjutan (*sustainable development*).

2.2. Konsep Ekonomi Inklusif

Suatu proses pembangunan secara umum ditujukan untuk mencapai tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Di berbagai negara pertumbuhan ekonomi menjadi syarat utama untuk mencapai penurunan kemiskinan. Akan tetapi pada kenyataannya perekonomian yang tinggi tidak begitu berperan bagi menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat bila tidak di ikuti dengan adanya pemerataan pendapatan dalam msayarakat yang bersangkutan.

Indonesia dan negara-negara lain di dunia, masih menghadapi kondisi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi antar individu maupun daerah. Fenomena kemiskinan dan ketidakadilan global ditunjukkan dengan adanya 20% populasi dunia yang mampu menikmati lebih dari 70% pendapatan dunia, atau dengan kata lain sebanyak 80% populasi dunia hanya mampu menikmati kurang dari 30% pendapatan dunia. Kemiskinan dan ketimpangan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Biasanya daerah yang memiliki sumber daya dan faktor produksi akan memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain yang tidak memiliki. Todaro (2003) berpendapat bahwa ketimpangan yang ekstrim akan menimbulkan berbagai dampak antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil.

Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa pertumbuhan saja belum cukup untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi biasanya hanya mementingkan pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) suatu negara tetapi kurang memerhatikan masalah penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Akibatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru menambah jumlah penduduk miskin dan memperlebar ketimpangan pendapatan antar individu. Menurut Eric Maskin (penerima penghargaan Nobel Ekonomi, 2007) mengukur hasil pembangunan hanya dari pertumbuhan ekonomi semata akan meniadakan terjadinya pemerataan dalam masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan.

Ketimpangan tidak hanya terkait pendapatan dan kekayaan namun juga berhubungan dengan ketimpangan kesempatan seperti akses pendidikan dan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin semua masyarakat menerima manfaat yang sama. Untuk memperoleh ukuran yang mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan masalah sosial, beberapa lembaga internasional seperti Asian Development Bank (ADB), World Economic Forum (WEF) dan United Nation Development Programme (UNDP) merumuskan suatu set variabel dan formula untuk melakukan pengukuran pertumbuhan ekonomi alternative yang menekankan pada kesetaraan akses terhadap peluang ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. Ukuran ini disebut dengan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Menurut ADB (2011), ada beberapa alasan mengapa pertumbuhan harus inklusif yaitu:

1) Pertimbangan kesetaraan dan keadilan, pertumbuhan seharusnya terdistribusi dan inklusif di seluruh lapisan masyarakat dan daerah.
2) Pertumbuhan dengan ketimpangan yang persisten dapat membahayakan kondisi sosial, seperti orang miskin dan pengangguran lebih rentan masuk dalam aktivitas kriminal, perempuan lebih rentan ke prostitusi, dan tenaga kerja anak yang tidak diharapkan.
3) Ketimpangan dalam hasil dan akses yang berkelanjutan dapat mengganggu stabilitas politik dan struktur sosial sehingga mengurangi potensi Pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi inklusif diawali dengan pembangunan ekonomi yang inklusif. Menurut Prasetyantoko, dkk (2012), pembangunan ekonomi inklusif adalah Pembangunan untuk semua orang, tidak peduli latar belakang dan perbedaan-perbedaannya. Hal ini senada dengan pendapat Ali dan Son (2007) yang menyatakan bahwa pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga memastikan kesempatan yang sama untuk semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

Pertumbuhan didefinisikan sebagai inklusif jika meningkatkan fungsi kesempatan sosial, yang tergantung pada dua faktor yaitu: (i) peluang rata-rata yang tersedia bagi masyarakat, dan (ii) bagaimana peluang dibagi kepada masyarakat. Pertumbuhan inklusif diukur dengan menggunakan fungsi kesempatan sosial atau fungsi kesejahteraan sosial. Pertumbuhan inklusif diukur dengan dua pendekatan yaitu partial dan full. Pendekatan partial berdasarkan “opportunity curve”, sedangkan pendekatan full berdasarkan indeks “opportunity curve”.

Konsep pertumbuhan inklusif menurut ADB (2020) adalah pertumbuhan ekonomi dengan kesetaraan kesempatan, konsep ini dikembangkan oleh Ali dan Zhuang (2007) dan Zhuang (2010), dimana terrdapat tiga dimensi kebijakan untuk menuju Pertumbuhan yang berkelanjutan dan memastikan semua lapisan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan. Tiga dimensi tersebut adalah:

1) Pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan akan menciptakan peluang ekonomi,
2) Social inclusion untuk memastikan setiap anggota masyarakat berkesempatan yang sama atas peluang ekonomi,
3) Social safety nets untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan.

Selanjutnya McKinley (2010) dan ADB menyusun indeks komposit untuk mengukur pertumbuhan inklusif di 6 negara yaitu Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, Filipina dan Uzbekistan dengan menggunakan data 1990-2006. Indeks inklusif ini menggunakan indikator (a) pertumbuhan, tenaga kerja produktif, infrastruktur ekonomi, (b) kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (termasuk kesetaraan gender), (c) kapabilitas manusia dan (d) perlindungan sosial. Indeks komposit ini didasarkan dengan metode skoring dan skema penimbang. Skor dibuat

menjadi 3 capaian yaitu tidak memuaskan (<4), memuaskan (4-7), dan sangat memuaskan (8-10).

UNDP dan Ramos, dkk (2013), mengukur pertumbuhan inklusif terdiri dari komponen outcome dan proses, yang melibatkan partisipasi dan benefit-sharing. Pertumbuhan inklusif merupakan peningkatan kapasitas produksi yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam proses pertumbuhan dan memastikan manfaatnya terdistribusikan. Ramos, dkk (2013) menyusun indeks inklusif untuk 43 negara berkembang dengan data tahun 1996-2006 berdasarkan tiga indikator yaitu: kemiskinan (headcount ratio at US$ 2 a day PPP), ketimpangan (GINI), Employment to Population Ratio/EPR (rasio tenaga kerja terhadap populasi). Alasannya adalah pengembangan kerangka pertumbuhan inklusif dapat diukur dari bagaimana hasil pertumbuhan didistribusikan (kemiskinan dan ketimpangan) dan bagaimana pertumbuhan mengubah peluang untuk partisipasi ekonomi (pekerjaan).

Kemudian nilai indeks yang dihasilkan skor berada pada skala 0 sampai 1, semakin dekat nilai indeks dengan 0, semakin inklusif. Secara khusus, indeks akan mendekati 0, semakin rendah tingkat kemiskinan dan indeks Gini sehingga-indeks rendah mengindikasikan tingkat inklusivitas yang tinggi.

World Economic Forum (2017) menyusun Inclusive Growth and Development Index (IDI) untuk 109 negara dengan data 2016 dimana negara-negara tersebut dikelompokkan menjadi negara ekonomi maju, negara berpendapatan menengah ke atas, negara berpendapatan menengah ke bawah dan negara berpendapatan rendah berdasarkan PDB per kapita. IDI merupakan indeks komposit berdasarkan 7 pilar yaitu education and skills, basic services and infrastructure, corruption and rents, financial intermediation of real economy investment, asset building and entrepreneurship, employment and labor compensation, dan fiscal transfers. Nilai indeks inklusif merupakan hasil agregasi skor masing-masing pilar. Ketujuh pilar tersebut terdiri dari beberapa indikator. Data indikator tersebut dikonversi menjadi skala 1-7 (dari terburuk ke terbaik).

2.3. Konsep Indikator Pembangunan Ekonomi

Indikator pembangunan ekonomi adalah nilai statistik yang digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi saat ini dan saat yang akan datang. Statistik tersebut diterbitkan secara periodik (bisa harian, bulanan, maupun tahunan) oleh pemerintah, lembaga-lembaga atau pun organisasi- organisasi swasta. Indikator pembangunan ekonomi tersebut dipublikasikan berdasarkan atas pengamatan terhadap industri-industri, wilayah/daerah, ataupun negara. Fungsi utama indikator pembangunan ekonomi adalah untuk menganalisis perkembangan ekonomi saat ini, memprediksi perkembangan ekonomi di masa yang akan datang, dan membuat perbandingan kinerja perekonomian suatu daerah dalam konteks antar waktu maupun antar daerah. Fungsi lain dari indikator pembangunan ekonomi adalah

untuk mengatur atau mengubah ekspektasi pasar. Oleh sebab itu, indikator pembangunan ekonomi dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasar barang dan jasa, pasar tenaga kerja, pasar valuta asing, pasar saham, dan pasar bursa berjangka.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) melakukan pengukuran kinerja pembangunan melalui tiga pilar dalam mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif yaitu: (1) pertumbuhan dan perkembangn ekonomi, (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan (3) perluasan akses dan kesempatan. Keberhasilan pencapaian masing-masing pilar pembangunan ekonomi tersebut diukur melalui beberapa indikator. Indikator untuk melihat kinerja pertumbuhan dan perkembangan ekonomi antara lain adalah pertumbuhan PDRB riil per kapita, kontribusi manufaktur terhadap PDRB, kesempatan kerja dan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN. Indikator untuk melihat kinerja pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan antara lain adalah indeks Gini, rasio rata-rata pengeluaran rumah tangga desa dan kota, dan persentase penduduk miskin. Kemudian, indikator untuk melihat perluasan akses dan kesempatan antara lain adalah Indeks Harapan Lama Sekolah, persentase penduduk yang memiliki jaminan Kesehatan, dan persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak.

Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri No. 86 Tahun 2017 juga mengemukakan sejumlah indikator kinerja penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan. Jumlah indikatornya lebih banyak dari konsep yang dikemukakan oleh Bappenas. Semua indikator dibagi atas tiga kelompok yaitu : (1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (2) Aspek Daya Saing, dan (3) Aspek Pelayanan Umum. Ada beberapa dari indikator tersebut sama dengan apa yang dikemukakan oleh Bappenas.

Selanjutnya, terkait dengan upay pembangunan secara global yang dikembangkan melalui program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), dimana pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan dan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16)

Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, 17 Tujuan TPB/SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu;

1) Pilar pembangunan sosial: meliputi Tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5
2) Pilar pembangunan ekonomi: meliputi Tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17
3) Pilar pembangunan lingkungan: meliputi Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15
4) Pilar pembangunan hukum dan tata kelola: meliputi Tujuan 16

2.4. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)

World Economic Forum (WEF) mendefinisikan ekonomi inklusif sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan suatu ukuran yang komprehensif dalam melihat dan mengukur tingkat inklusivitas dari pembangunan Indonesia saat ini dan ke depannya.

Menurut Ignacy Sach (2004), strategi pembangunan ekonomi inklusif beserta seluruh kebijakan turunannya harus memiliki paling tidak tiga komponen penting sebagai fondasi utama: yaitu:

1) Negara harus menjamin hak-hak politik, sosial, dan kewarganegaraan. Komponen ini sangat terkait erat dengan nilai fundamental demokrasi, yakni transparansi dan akuntabilitas, yang sangat diperlukan untuk bekerjanya proses pembangunan. Ketiga hak ini juga upaya pra-kondisi untuk tercapainya sebuah pembangunan yang inklusif.
2) Semua warga negara harus memiliki akses yang sama ke semua program kesejahteraan.
3) Semua populasi juga harus mendapatkan peluang-peluang yang sama terhadap akses pelayanan publik, seperti pendidikan, perlindungan/jaminan kesehatan dan perumahan.

Sedangkan dari sisi implementasi, ada empat pilar utama yang harus dikembangkan sebagai basis utama membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yakni penguatan infrastruktur ekonomi, penguatan sumber daya manusia, penguatan sistem keuangan yang inklusif, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

Dalam paradigma itu, perluasan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur harus lebih diutamakan dibandingkan dengan perbaikan infrastruktur itu sendiri. Untuk itu, infrastruktur yang mampu berperan sebagai katalis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif adalah jenis infrastruktur yang mampu memberikan akses secara merata terhadap masyarakat untuk mendapatkan pelayanan air bersih,

sanitasi, listrik, dan pendidikan. Akses terhadap semua itu akan mendorong masyarakat mengembangkan kehidupan sosial ekonomi mereka.

Disinilah pemerintah penting memiliki sebuah program yang komprehensif dan beberapa strategi bisa dilakukan antara lain: Pemerintah perlu menggunakan anggaran dengan baik, benar, efisien, dan efektif. Selain itu, di tengah kontraksi ekonomi global dan nasional, langkah reformasi serta tata kelola sektor pertanian yang terbukti tumbuh positif di saat pandemi ini harus segera dilakukan. Investasi langsung di sektor ini menjadi pilihan yang tak dapat dihindari karena terbukti mampu menjadi penopang ekonomi nasional saat krisis. Disamping ituj, program-program hilirisasi yang dilaksanakan dengan serius dan sistematis bisa menjadi strategi yang tepat menuju kondisi perekonomian inklusif.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia telah dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas di tingkat nasional dan provinsi, indeks ini terbagi menjadi tiga pilar (pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta pilar perluasan akses dan kesempatan) dengan delapan sub-pilar utama serta 21 indikator. Adapun Komposisi pilar dan bobot dalam penyusunan angka indeks dapat dilihat pada gambar berikut:

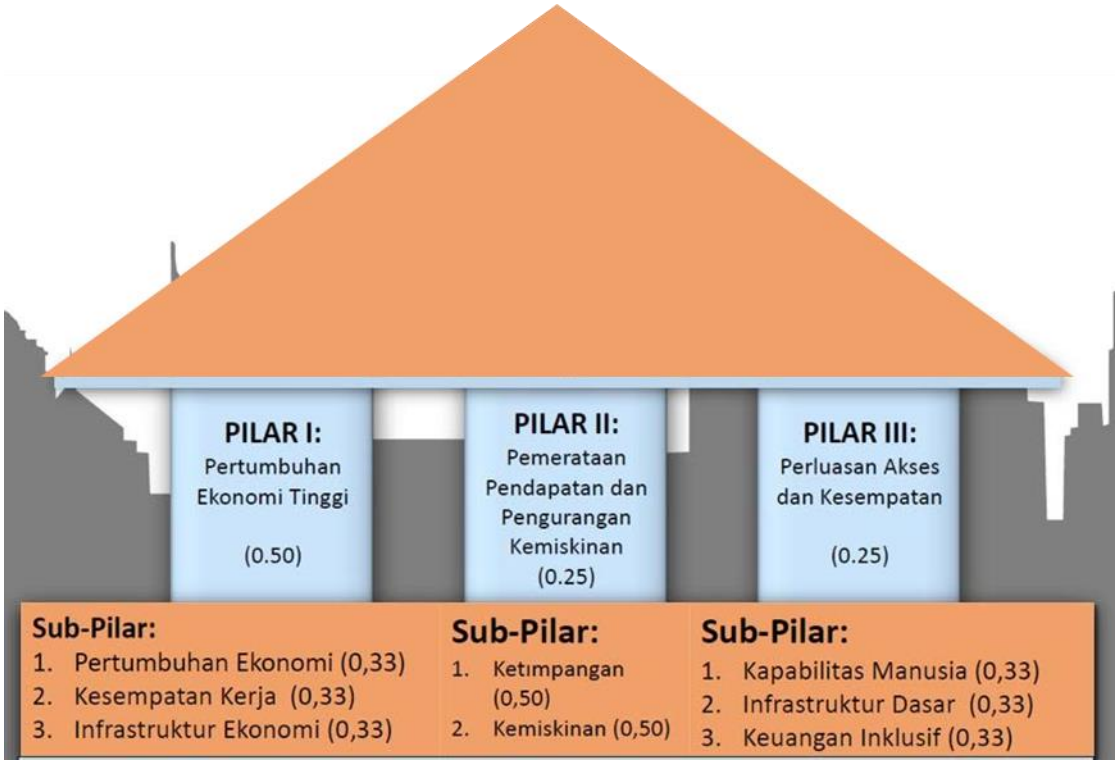

Gambar 1. Pilar Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Sumber: Bappenas, 2021

Selanjutnya indicator untuk masing-masing pilar adalah sebagai berikut:

Pilar 1: Pertumbuhan dan Perkembangan ekonomi

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tinggi menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomidan kesempatan kerja, dimana pada akhirnya akan dapat menciptakan Pembangunana ekonomi yang inklusif

Sub-pilar 1.1: Pertumbuhan Ekonomi:

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat, dengan indikator:

1) Pertumbuhan PDB/PDRB riil per kapita; angka tersebut didapatkan dari nilai PDB/PDRB atas dasar harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu untuk menunjukkan nilai PDB/PDRB per satu orang penduduk secara riil (terkoreksi dengan angka inflasi) yang dinyatakan dalam persen.
2) Share (besaran) sektor manufaktur terhadap PDB/PDRB adalah persentase porsi sektor manufaktur terhadap keseluruhan PDB/PDRB. Industri Manufaktur adalah suatu kegiatan ekonomi yang terkait dengan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi; dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya; dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan (assembling).
3) Rasio kredit perbankan terhadap PDB/PDRB dihitung dari total kredit terhadap total PDRB yang menunjukkan perbandingan antara total pemberian kredit terhadap produktivitas ekonomi. Rasio tersebut menilai seberapa besar angka pinjaman (kredit) atas total produksi di sebuah perekonomian.

Sub-Pilar 1.2: Kesempatan Kerja

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian tidak lepas dari demografi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Semakin luas kesempatan kerja suatu wilayah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan semakin meningkat. Kesempatan kerja yang luas secara langsung meningkatkan tingkat produktivitas dan berpengaruh pada tingkat pembangunan ekonomi, Dengan indikator:

1) Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) menggambarkan peluang seorang individu yang termasuk dalam angkatan kerja untuk bisa terserap dalam pasar kerja atau dapat bekerja. Semakin besar angka TKK, semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah.

2) Penduduk bekerja penuh adalah pekerja yang jumlah jam kerjanya dalam seminggu adalah lebih dari atau sama dengan 35 jam (≥35 jam). Pekerja

penuh menunjukkan pekerjaan yang relatif lebih stabil serta memberikan paket tunjangan yang lebih baik bagi individu. Maka dengan jumlah jam kerja penuh, seseorang relatif lebih dapat menjamin penghidupannya untuk menjadi sejahtera. Penduduk dengan jam kerja ≥35 jam juga sering disebut dengan istilah pekerja formal.

3) Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah ke atas, indikator ini secara umum menunjukkan kualitas pekerja yang relatif lebih baik. Pekerja dengan tingkat pendidikan lebih tinggi memastikan jenis pekerjaan yang lebih profesional. Tingkat tenaga kerja yang berkualitas membuat tingkat inklusivitas ekonomi yang lebih tinggi, karena artinya akses dan kesempatan lebih bisa terserap oleh berbagai lapisan masyarakat.

Sub-Pilar 1.3: Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur ekonomi mengukur seberapa besar pertumbuhan ekonomi sudah dapat diakses masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpaku pada tingginya angka pendapatan, namun juga perlu memperhatikan infrastruktur sebagai daya dukung untuk memperlancar pencapaian target pertumbuhan. Infrastruktur yang dimaksud adalah perangkat dukungan yang dapat memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Dengan indikator:

1) Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik/PLN adalah persentase rumah tangga yang di rumahnya sudah tersedia jaringan atau dapat mengakses listrik/PLN terhadap total rumah tangga secara keseluruhan. Istilah lainnya disebut juga sebagai tingkat ***elektrifikasi***. Tingkat elektrifikasi ini menggambarkan perluasan akses dan manfaat ekonomi karena pembangunan ekonomi dimulai dengan ketersediaan infrastruktur listrik. Aktivitas ekonomi berjalan cepat jika ketersediaan listrik sudah merata untuk semua masyarakat.

2) Persentase penduduk yang memiliki telepon genggam adalah persentase penduduk yang memiliki atau menguasai telepon seluler. Indikator ini menunjukkan kecakapan individu dalam menggunakan telepon seluler atau perangkat telekomunikasi elektronik. Penggunaan telepon seluler menjadi sarana pendukung pemerataan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

3) Persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang diukur dari total panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang terhadap luas wilayah. Total panjang jalan dengan kondisi baik mencerminkan keterjangkauan infrastruktur jalan dan aktivitas ekonomi yang lebih lancar. Artinya pertumbuhan ekonomi bisa menjangkau lebih banyak masyarakat.

Pilar 2: Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemsikinan

Pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, untuk itu ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan. Adapun indikator yang digunakan adalah:

Sub-Pilar 2.1: Ketimpangan

1) Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 - 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama rata, dan bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Rasio Gini atau juga disebut koefisien Gini didasarkan pada pengukuran luas kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari variabel pendapatan dengan distribusi kumulatif penduduk. Nilai rasio Gini yang tinggi menggambarkan ketimpangan ekonomi yang juga tinggi.
2) Sumbangan pendapatan perempuan merupakan sebuah indikator yang menggambarkan seberapa besar diskriminasi upah yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Sumbangan pendapatan perempuan dihitung dari proporsi angkatan kerja perempuan dikalikan rasio upah perempuan terhadap rata-rata upah. Semakin tinggi nilai sumbangan pendapatan perempuan, semakin baik dan merata sebuah perekonomian.
3) Rasio rata-rata pengeluaran rumah tangga desa terhadap kota menunjukkan perbandingan rata-rata pengeluaran rumah tangga pedesaan terhadap rumah tangga perkotaan. Rasio ini juga menggambarkan disparitas antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Angka rasio yang semakin tinggi menunjukkan tingkat pemerataan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan.

Sub-Pilar 2.2: Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan merupakan syarat cukup pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang disertai angka kemiskinan yang tinggi membuat pertumbuhan itu sendiri tidak berkelanjutan. Adapun indicator yang digunakan untuk sub pilar ini adalah:

1) Persentase penduduk miskin merupakan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu garis kemiskinan merupakan batas pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal kalori yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan non makanan (perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transpor, dan kebutuhan pokok lainnya).

2) Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari adalah jumlah konsumsi protein dari komoditi pangan yang dikonsumsi penduduk di satu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan banyaknya kandungan gizi protein dari komoditi yang dimasak di rumah. Konsumsi protein yang tinggi secara rata-rata dapat menjadi ukuran perbaikan kesejahteraan; yang mengindikasikan penduduk miskin keluar dari kemiskinan.

Pilar 3 Perluasan akses dan Kesempatan Kerja

Pilar ini untuk memasikan seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap penggunaan infrastruktur dasar dan keuangan yang inklusif serta memberikan kesempatan pengembangan kapabilitas sumberdaya manusia yang adil dan berkualitas

Sub-Pilar 3.1: Kapabilitas Manusia

Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif, dengan indikatornya

1) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur- umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.
2) Persentasi Balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Indikator ini menggambarkan tingkat pelayanan imunisasi lengkap terhadap balita. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin baik program pelayanan kesehatan, dalam hal ini pemberian imunisasi. Balita yang mendapat imunisasi dasar lengkap (PBD) adalah balita yang diimunisasi DPT sebanyak tiga kali, polio sebanyak tiga kali, BCG dan campak.
3) Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan menunjukkan besaran cakupan jaminan kesehatan pada masyarakat. Jaminan kesehatan bersifat sebagai jaring pengaman bagi masyarakat ketika mengalami kendala kesehatan. Adanya jaminan kesehatan merupakan salah satu indikasi masyarakat memiliki kualitas hidup yang lebih baik karena masyarakat terbantu dalam urusan finansial ketika menghadapi masalah kesehatan.

Sub-Pilar 3.2: Infrastruktur Dasar

Akses terhadap infrastruktur yang lebih luas menunjukkan sebuah pembangunan yang sudah lebih merata juga memudahkan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi. Perluasan akses tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur dasar yang mapan.Indikatornya adalah:

1) Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.
2) Persentase rumah tangga dengan fasilitas buang air sendiri adalah perbandingan antara rumah tangga memiliki fasilitas buang air sendiri dengan rumah tangga seluruhnya. Ketersediaan fasilitas buang air dalam rumah tangga merupakan salah satu dari syarat sanitasi yang layak. Sanitasi yang layak merupakan salah satu indikator kelayakan hidup serta kesejahteraan.

Sub-Pilar 3.3: Keuangan Inklusif

Institusi keuangan memiliki fungsi intermediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka akses terhadap institusi keuangan yang lebih luas akan mampu mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Indikatornya adalah:

1) Rasio jumlah rekening dana pihak ketiga (DPK) terhadap penduduk usia produktif adalah pembagian jumlah total rekening DPK perbankan terhadap jumlah penduduk dewasa (usia di atas 15 tahun). Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat penggunaan produk dan jasa keuangan yang merupakan salah satu dimensi keuangan inklusif.

2) Rasio kredit perbankan UMKM adalah perbandingan antara jumlah rekening kredit perbankan yang disalurkan untuk pembiayaan kegiatan UMKM terhadap total rekening kredit perbankan seluruhnya. Semakin banyak kredit perbankan yang tersalurkan untuk kegiatan UMKM menunjukkan pembangunan ekonomi sudah mampu memperluas

kesempatan kerja dan berusaha bagi pengusaha skala kecil atau kelompok masyarakat di kelas pendapatan yang lebih kecil.

Secara ringkas, Indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusi (IPEI) menurut Pilar dapat digambarkan sebagai berikut:

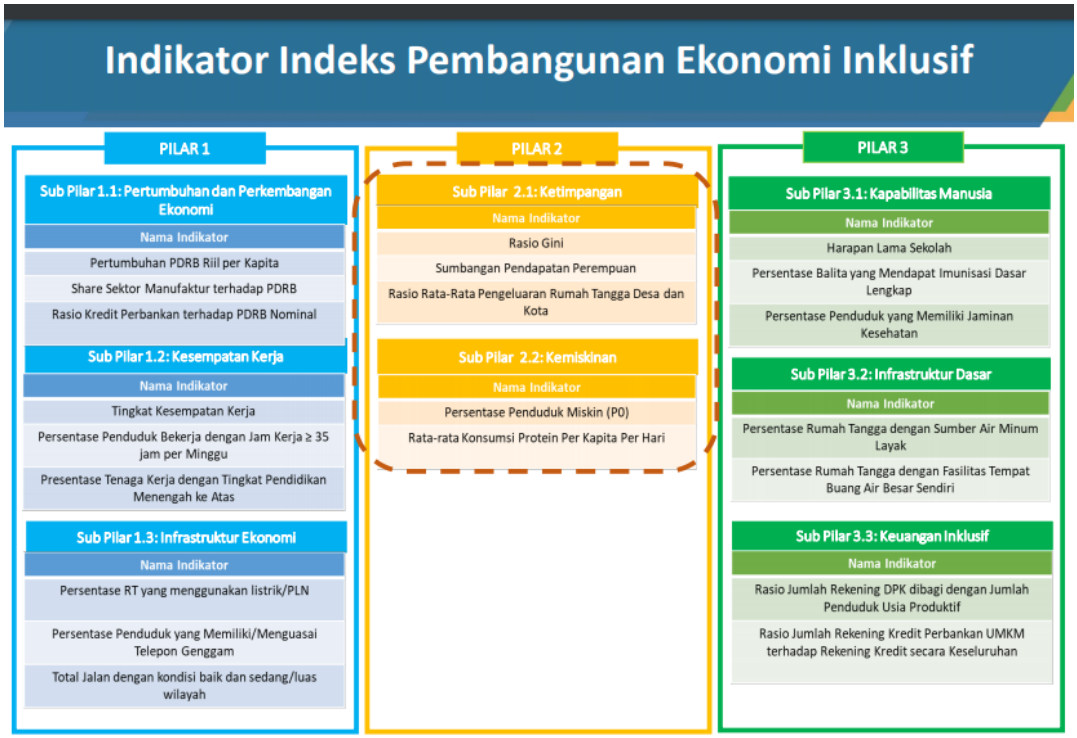

Sumber: BAPPENAS, 2021

Gambar 2 Indikator Indeka Pembangunan Ekonomi Inklisif (IPEI)

2.5. Teori Pembangunan Ekonomi Wilayah

Pembangunan ekonomi merupakan unsur dan proses penting dalam pengembangan wilayah, dimana salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Adanya peningkatan perekonomian di suatu wilayah mengindikasikan adanya pembangunan di wilayah tersebut. Meskipun demikian, peningkatan kapasitas ekonomi bukanlah satu-satunya aspek dalam pembangunan. Perekonomian di suatu wilayah dikatakan mengalami peningkatan atau perkembangan apabila jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar di bandingkan dengan tahun sebelumnya, dan untuk melihat peningkatan jumlah barang yang dihasilkan maka pengaruh perubahan harga-harga terhadap nilai pendapatan daerah pada berbagai tahun harus dihilangkan yaitu dengan melakukan perhitungan pendapatan daerah berdasarkan atas harga konstan, dari nilai ini akan diperoleh pendapatan riil dari masyarakat daerah yang bersangkutan.

Pertumbuhan ekonomi wilayah sering dijadikan sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Banyak pemerintah daerah yang menjadikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai target utama dalam

pembangunan wilayah. Mengingat begitu pentingnya pertumbuhan ekonomi bagi suatu wilayah, banyak para ahli yang telah membahas tentang hal ini. Ada beberapa teori yang menghubungkan antara aspek ekonomi dengan aspek keruangan dan wilayah yang dikembangkan oleh para ahli, diantaranya adalah:

1) **Pertumbuhan Berimbang dan Pertumbuhan Tidak Berimbang.**

   Menurut Gultom (2006), pertumbuhan berimbang merupakan upaya pembangunan di berbagai sektor, yaitu dengan malakukan investasi secara berimbang pada sejumlah sektor/industri yang saling menunjang sehingga pasar menjadi semakin besar dan memiliki daya saing. Dengan demikian, tidak hanya satu sektor saja yang menjadi tumpuan pembangunan akan tetapi ada beberapa sektor yang dijadikan tumpuan.

   Konsep pertumbuhan berimbang ini biasanya diterapkan dengan tujuan untuk menjaga agar proses pembangunan ekonomi masyarakat tidak menghadapi hambatan dalam memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi dan fasilitasfasilitas untuk mengangkut hasil-hasil produksi ke pasar dan juga dalam memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan akan diproduksi dalam suatuwillayah.

   Lewis dalam Gultom (2006) menyatakan bahwa pembangunan akan menghadapi banyak masalah jika hanya dipusatkan pada satu sektor saja. Tanpa adanya keseimbangan pembangunan antar berbagai sektor akan menimbulkan ketidakstabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi sehingga pembangunan menjadi terhambat. Namun pada kenyataanya akan sangat sulit untuk melakukan investasi di segala sektor karena adanya keterbatasan sumberdaya manusia, bahan mentah maupun modal untuk melakukan investasi secara serempak pada semua sektor/industri yang saling melengkapi. Oleh karena itu, investasi harus dipriotitaskan pada sektor-sektor tertentu saja yang dinilai akan memberikan hasil terbaik agar investasi cepat berkembang dan hasil ekonominya dapat digunakan untuk pembangunan pada sektor lain, konsep ini kemudian lebih dikenal sebagai konsep pertumbuhan tidak berimbang.

   Konsep Pertumbuhan tidak seimbang dikemukakan oleh Hirschman, Streeten dan beberapa ahli lain. Hirschman dan Streeten dalam Jhingan (2007) mengemukakan bahwa pembangunan tidak seimbang lebih tepat digunakan dalam mempercepat proses pembangunan dinegara-negara sedang berkembang. Menurut Hirschman, investasi pada industri atau sektor-sektor perekonomian yang strategis akan menghasilkan kesempatan investasi baru dan membuka jalan bagi pembangunan ekonomi lebih lanjut.

Hirschman juga menyatakan bahawa pembangunan memang harus berlangsung dalam cara etrsebut, yaitu dengan mendorong pertumbuhan ekonoimi pada sektor utama, karena sector ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi ke sector pendukungnya, dari satu industri ke industri lainnya, dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, dan pada akhirnya peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah akan tercapai.

Namun demikian, konsep pertumbuhan tidak berimbang juga mempunyai keterbatasan dalam menggambarkan dan mengatasi permasalahan ekonomi di Negara berkembang. Namun para ahli menilai bahwa dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang lebih cocok untuk menerapkan konsep pertumbuhan tidak berimbang, sedangkan konsep pertumbuhan berimbang lebih cocok untuk diterapkan di negara-negara maju (Jhingan, 2007)

2) Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi (*economic base theory*) yang di kemukakan oleh John Glasson (1987), menyatakan bahwa ada keterkaitan antara sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah dengan kekuatan-kekuatan pendorong salah satu sector kepada sektor yang lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimana perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sektor yaitu sector kegiatan basis dan kegiatan bukan basis. Kegiatan basis (*basic activities*) adalah kegiatan ekonomi yang mengahasilkan barang-barang dan jasa-jasa, dan menjualnya atau memasarkan produknya keluar daerah, sedangkan kegiatan-kegiatan ekonomi bukan basis (*non basic activities*) adalah usaha ekonomi yang menyediakan barang-barang dan jasa-jasa untuk kebutuhan masyarakat dalam wilayah ekonomi di daerah yang bersangkutan saja. Hal ini berarti bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi bukan basis tidak menghasilkan produk untuk diekspor keluar daerahnya. Oleh karena itu, luas lingkup produksi mereka itu dan daerah pemasarannya masih bersifat lokal.

Menurut teori ini, meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi basis di dalam suatu daerah akan meningkatkan jumlah pendapatan daerah yang bersangkutan, kemudian akan meningkatka permintaan terhadap barang dan jasa di daerah itu dan akan mendorong kenaikan volume kegiatan ekonomi bukan basis (*effect multiplier*). Sebaliknya apabila terjadi penurunan jumlah kegiatan basis akan berakibat berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam daerah yang bersangkutan, dan selanjutnya akan terjadi penurunan permintaan terhadap barang-barang yang di produksi oleh kegiatan bukan basis.

Dengan demikian keterkaitan antara sector basis dan non basis juga akan menentukan aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Untuk itu, penguatan kedua sector akan menjadi penguatan bagi perekonomian daerah. Sektor basis sering juga disebut dengan sektor unggulan

2.6. Peran Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Perkonomian

Upaya pembangunan perekonomian suatu wilayah sebaiknya diawali dengan melakukan analisis terhadap struktur dan tingkat kinerja kegiatan ekonomi atau perekonomian wilayah yang bersangkutan. Analisis ini berguna untuk mengetahui karakteristik dari struktur perekonomian yang ada dalam suatu wilayah serta mengetahui pertumbuhan atau kemampuan tumbuh kembang perekonomian wilayah dari waktu ke waktu, serta peran dari masing-masing sektor ekonomi pada suatu wilayah, sehingga dapat mengenali sektor unggulan yang dapat dikembangkan dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah.

Pengembangan sektor unggulan dalam usaha pengembangan dan pembangunan ekonomi wilayah bertujuan untuk mengatasi keterbatasan dana dan sumber daya serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk dapat melaksanakan pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah denagn lebih optimal dan dalam rangka optimasi dan efisiensi pembangunan perekonomian daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan.

Selanjutnya, dalam lingkup pengarahan pembangunan diperlukan adanya suatu prioritas, dimana penentuan prioritas pembangunan ini diperlukan karena adanya keterbatasan dalam hal waktu, pendanaan, tenaga, dan sumber daya yang tersedia. Salah satu cara untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah adalah dengan cara melakukan kajian dan analisis terhadap kegiatan perekonomian atau sektor ekonomi unggulan yang ada guna mengetahui kemampuan kinerja serta tumbuh kembang dari masing-masing sektor ekonomi. Kemampuan tumbuh kembang pada salah satu sektor ekonomi akan menjadi faktor penunjang dan penentu atau pendorong bagi pertumbuhan sektor yang lainnya. Oleh sebab itu, salah satu factor terpenting didalam pengembangan wilayah adalah pertumbuhan perekonomian wilayah dengan cara mengembangkan sektor-sektor unggulan yang ada.

Dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah, pemahaman terhadap struktur ekonomi wilayah menjadi hal yang sangat penting untuk dapat menilai permasalahan dan potensi serta peluang yang dimiliki oleh suatu wilayah atau daerah yang bersangkutan. Suatu gambaran yang komprehensif mengenai struktur ekonomi wilayah sangat bermanfaat dalam perencanaan wilayah (Sitohang, 1977).

Proses pembangunan bukan hanya ditentukan oleh aspek ekonomi saja, namun demikian, pertumbuhan ekonomi masih merupakan unsur penting dalam

proses pembangunan wilayah di Indonesia. Wilayah yang dimaksudkan disini dapat berbentuk provinsi, kabupaten atau kota. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih merupakan target utama pembangunan dalam rencana pembangunan wilayah disamping pembangunan sosial. Sedangkan target pertumbuhan ekonomi tersebut ternyata sangat bervariasi sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Melalui pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi diharapkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap akan dapat ditingkatkan (Sjafrizal, 2008).

BAB III
METODOLOGI

3.1. Pendekatan Pelaksanaan

Pekerjaan penyusunan Kajian Pembangunan Ekonomi Terpadu Kota Solok menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif merupakan data sekunder dan primer yang yang diperoleh dari dinas-dinas terkait dan studi lapangan. Sementara data kualitatif diperoleh dari diskusi dengan tim teknis Kota Solok. Langkah berikutnya menganalisis data kualitatif dan kuantitatif yang kemudian diinterpretasikan sesuai dengan konsep teori dan perkembangan data Penggabungan kedua analisis ini, akan lebih memperluas wawasan permasalahan dan kondisi objektif makro ekonomi Kota Solok dalam beberapa tahun terakhir. Adapun rincian metode pendekatan sebagai berikut :

1) Desk study berupa kajian terhadap data-data sekunder yang dipublikasikan oleh lembaga terkait dan kemudian didiskusikan bersama dengan tim teknis.
2) Mengumpulkan berbagai informasi kualitatif dan kuantitatif, baik lisan maupun secara tertulis (terdokumentasikan) untuk melengkapi data sekunder yang sudah ada.
3) Mencermati kebijakan Pembangunan ekonomi pemerintah provinsi dan pusat serta arah & strategi pembangunan ekonomi Kota Solok did alam RPJMD Kota Solok 2021-2026
4) Mencermati kondisi capaian pembangunan ekonomi dan prospeknya pada masa yang akan datang.

Data yang diperlukan dalam penyusunan Kajian Pembangunan embangunan Ekonomi Terpadu Kota Solok ini adalah data sekunder dan dokumen perencanaan yang diperoleh dari berbagai instansi terkait yakni BPS, Bank Indonesia, Bappeda dan SKPD terkait serta situs internet.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk kajian dan penelaahan adalah dengan melakukan penelusuran data yang telah terdokumentasikan oleh lembaga terkait. Beberapa data

dapat juga diperoleh melalui situs internet. Selain itu, data dan informasi dikumpulkan pula dengan berdiskusi dengan tim teknis pemerintah Kota Solok.

3.3. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah mengikuti tinjauan konsep-konsep dan formula perhitungan ekonomi dan statistik. Untuk mempermudah dan mempercepat serta mencapai keakuratan perhitungan maka digunakan bantuan software statistik dan excel.

3.4. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpulkan maka dilakukan sortir data. Sortir data adalah kegiatan untuk memilah-milah data yang relevan dan data yang kurang relevan bahkan mungkin tidak bermanfaat dalam penyusunan Dokumen Kajian Pembangunan Ekonomi Terpadu Kota Solok namun terikut dalam proses pengumpulan data sekunder. Selanjutnya data yang telah terpilah dianalisis dan disajikan secara deskriptif dan obyektif.

Adapun alat analisis data yang diterapkan adalah:

1) Analisis Location Quotient (LQ)

Location Quotient (LQ) adalah suatu rasio perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/ industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut secara regional maupun nasional, dengan formula adalah sebagai berikut

$$LQ = \frac{V_1^R / V^R}{V_1 / V}$$

dimana :

V_1^R = Nilai PDRB suatu sektor kabupaten/kota

V^R = Nilai PDRB seluruh sektor kabupaten/kota

V_1 = Nilai PDRB suatu sektor tingkat propinsi

V = Nilai PDRB seluruh sektor tingkat propinsi.

Apabila nilai koefisien LQ > 1 artinya peranan sektor tersebut di daerah itu lebih menonjol dari pada peran sektor secara provinsi/nasional. Sebaliknya, apabila LQ < 1. Nilai koefisin LQ > 1 memberikan indikasi bahwa daerah tersebut memiliki keunggulan komparatif untuk sektor i tersebut.

2) **Analisis *Multiplier Effect***

Glasson (1987); telah mengembangkan teori multiplier regional; dalam teori ini dikemukakan adanya hubungan saling berkaitan antara sektor-sektor ekonomi dalam suatu wilayah serta kekuatan-kekuatan pendorong salah satu sektor ke sektor yang lainnya secara langsung maupun tidak langsung, teori ini juga dikenal dengan teori basis ekonomi (*economic base theory*).

Menurut teori ini meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi basis di dalam suatu daerah, akan meningkatkan jumlah pendapatan daerah yang bersangkutan. Selanjutnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa di daerah itu dan akan mendorong kenaikan volume kegiatan ekonomi bukan basis (*effect multiplier*). Sebaliknya apabila terjadi penurunan jumlah kegiatan basis, akan berakibat berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam daerah yang bersangkutan, dan selanjutnya akan terjadi penurunan permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh kegiatan bukan basis.

Dampak pengganda suatu sektor dirumuskan sebagai berikut:

$$Ei = \left(\frac{Esi}{Ebi} \right)$$

Dimana r merupakan efek pengganda (multiplier effect), E_{si} adalah aktivitas sektor non basis, dan E_{bi} merupakan aktivitas sektor basis. Selanjutnya aktivitas sektor basis dirumuskan sebagai berikut :

$$Esi = EiR - \left(\frac{Ein}{EN} \right) ER$$

Sedangkan untuk menghitung aktivitas non basis digunakan rumus sebagai berikut : $\boldsymbol{Esi = EiR - Ebi}$

Dimana :

EiR : Produksi sektor i di daerah yang diselidiki
ER : Produksi seluruhnya (Total Produksi) di daerah yang diselidiki
EiN : Produksi sektor i di seluruh daerah yang lebih luas dimana daerah yang diselidiki menjadi bagiannya
EiR : Produksi seluruhnya (Total Produksi) di seluruh daerah yang Lebih luas dimana daerah yang diselidiki menjadi bagiannya

3) Analisis Input – Output

a) Definisi Input Output

Analisis Input – Output adalah suatu analisis atas perekonomian wilayah secara comprehensive karena melihat keterkaitan antar sektor ekonomi di wilayah secara keseluruhan. Dengan demikian apabila terjadi perubahan tingkat produksi atas sektor tertentu, dampaknya terhadap sektor lain dapat dilihat. Selain itu analisis ini juga terkait dengan tingkat kemakmuran masyarakat diwilayah tersebut melalui input primer (nilai tambah). Artinya akibat perubahan tingkat produksi sektor-sektor tersebut, dapat dilihat seberapa besar kemakmuran masyarakat bertambah/berkurang. Setiap produksi pasti membutuhkan Input

agar produksi itu dapat dihasilkan. Hasil produksi dapat langsung di konsumsi atau sebagai input untuk menghasilkan produk lain atau input untuk produk yang sama pada putaran berikutnya, misalnya bibit. Input dapat berupa Output dari sector lain (termasuk dari sektor sendiri tetapi dari putaran sebelumnya) yang sering disebut Input antara berupa bahan baku dan Input primer berupa tenaga kerja, keahliaan, peralatan, dan modal. Keikutsertaan faktor-faktor produksi akan mendapat imbalan yang menjadi pendapatan masyarakat sesuai dengan peran/keterlibatannya.

Secara teknis, tabel Input – Output (I-O) merupakan sebuah matriks yang memperlihatkan keterkaitan transaksi barang dan jasa antar sektor-sektor ekonomi (lihat table 3.1). Baris dari matriks menunjukkan bagaimana output suatu sektor ekonomi dialokasikan ke sektor-sektor lainnya untuk memenuhi permintaan antara dan permintaan akhir, sedangkan kolom dari matriks menunjukan pemakaian input antara dan input primer oleh suatu sektor dalam suatu proses produksinya. Besarnya ketergantungan suatu sektor ditentukan oleh jumlah input yang digunakan dalam proses produksinya maupun besarnya output yang dialokasikan untuk memenuhi permintaan antara dan permintaan akhir sektor lain.

Table 3.1. Matrix dasar Input Output

Alokasi Output / Struktur Input				Permintaan Antara: Sektor Produksi A……Z		Permintaan Akhir	Total Output
				1…….n	1…….n	A…..Z	
Input Antara	Sektor Produksi	A	1	$X_{11}^{AA}..X_{1n}^{AZ}$	$X_{11}^{AA}..X_{1n}^{AZ}$	F_1	Y_1
		.	.	…….	…….	.	.
		.	.	…….	…….	.	.
		.	.	…….	…….	.	.
		.	.	…….	…….	.	.
		.	.	…….	…….	.	.
		.	.	…….	…….	.	.
		Z	m	$X_{m1}^{ZA}..X_{mn}^{ZZ}$	$X_{m1}^{ZA}..X_{mn}^{ZZ}$	F_n	Y_n
Nilai Tambah Bruto (Input Primer)				V_1…..……..V_n			
Total Input				Y_1..……..……..Y_n			

Badan Pusat Statistik (2000a; 2000b) mengatakan bahwa analisis input output dapat dimanfaat untuk keperluan sebagai berikut:

1. Dapat memperkirakan dampak permintaan akhir terhadap output, nilai tambah, impor, permintaan, pajak dan kebutuhan tenaga kerja diberbagai sektor produksi.
2. Dapat mengidentifikasi sektor yang pengaruhnya paling dominan atau tidak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor yang peka terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Dapat menyusun memperkirakan indikator ekonomi makro.

4. Dapat melihat komposisi penyediaan dan penggunaan barang dan jasa, serta kaitannya terhadap kebutuhan impor dan kemungkinan subtitusinya.
5. Dapat digunakan untuk menganalisis perubahan harga, yaitu dengan melihat pengaruh langsung dan tidak langsung dari perubahan harga input terhadap output.

a) **Metode Penyusunan Tabel Input Output**

Berdasarkan ketersediaa data, penyusunan Tabel I-O dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan langsung dan tidak langsung. Pendekatan langsung dilakukan melalui pengumpulan data secara langsung melalui survei atau penelitian lapangan, sedangkan pendekatan tidak langsung atau metode non survei diperoleh dari penyesuaian terhadap Tabel I-O lain yang sudah ada. Analisis input output Kota Solok dalam rangka mengkaji pembangunan ekonomi terpadu dilakukan dengan menggunakan pendekatan tidak langsung atau metode non survei.

Secara spesifik, metode non survei dalam penyusunan Tabel I-O dilakukan melalui *updating* (pemutakhiran), dimana dalam pengisian sel-sel Tabel I-O tidak menggunakan metode survei. Hal ini terutama dilakukan untuk menduga atau menaksir matriks kuadran I atau matriks transaksi antar yang datanya tidak selalu tersedia. Oleh karena itu tujuan utama metode non-survei adalah menaksirkan dan memperbaiki koefisien input antara atau koefisien teknis (A) pada Tabel I-O. Sedangkan pembentukan matriks di kuadran II (permintaan akhir) perolehan datanya relatif lebih mudah, misalnya data pendapatan nasional, data ekspor dan impor yang setiap tahunnya tersedia. *Updating* (pemutakhiran) table IO dilakukan menggunakan metode RAS.

b) Langkah-langkah Penghitungan Tabel Input-Output

Langkah pertama yang dilakukan dalam penyusunan Tabel I-O Kota Solok adalah penyusunan klasifikasi sektor, dimana seluruh kegiatan ekonomi di Kota Solok dikelompokkan ke dalam sektor-sektor ekonomi. Salah satu pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan klasifikasi ini adalah didasarkan pada satuan komoditif atau kegiatan ekonomi yang mempunyai kesamaan dalam produk yang dihasilkan atau kesamaan dalam kegiatan ekonomi.

Langkah kedua adalah pengumpulan data/ informasi dari berbagai sumber yang cukup relevan untuk digunakan sebagai dasar dalam memperkirakan output, nilai tambah atau setidak-tidaknya harus cukup memadai untuk menyusun struktur input dari masing-masing sektor berdasarkan klasifikasi yang disusun. Dalam hal ini data yang digunakan adalah data sekunder yang diterbitkan oleh BPS Kota Solok.

Langkah ketiga adalah melakukan penghitungan/ perkiraan output (kontrol total), perkiraan nilai tambah bruto sektoral, penyusunan struktur (koefisian) input untuk masing-masing sektor serta penyusunan struktur input untuk masing-masing komponen perintaan akhir. Hasil yang dicapai pada langkah ketiga akan menjadi bahan dasar (utama) dalam menyusun Tabel I-O Kota Solok.

Langkah keempat adalah pengolahan dan penyusunan tabel transaksi antara sektor ekonomi sehingga terbentuk secara lengkap matriks Input-Output. Penyusunan tabel transaksi dilakukan dengan metode RAS. Tabel transaksi yang dirujuk adalah tabel transaksi I-O Provinsi Sumatera Barat tahun 2016.

Langkah terakhir adalah proses rekonsiliasi antara sektor baris dan kolom. Proses ini dilakukan berukang-ulang disertai pengecekan terhadap kelayakan dan konsistensi data yang kemudian dilanjutkan denhan pembuatan tabel-tabel analisis.

4) Metode RAS

Metode RAS adalah metode penaksiran matriks teknologi daerah tertentu berdasarkan matriks teknologi di daerah lain. Langkah-langkah metode RAS adalah seperti berikut:

1. Tentukan matriks teknologi daerah asal

$$A(0) = \begin{bmatrix} a_{11}(0) & a_{12}(0) & a_{13}(0) \\ a_{21}(0) & a_{22}(0) & a_{23}(0) \\ a_{31}(0) & a_{32}(0) & a_{33}(0) \end{bmatrix}$$

2. Tentukan jumlah output sektoral pada daerah yang dicari, notasikan dengan X(1). Kemudian tentukan kolom transaksi input output pada daerah yang dicari dinotasikan V(1), yang menyatakan jumlah output seluruh sektor yang digunakan sebagai input untuk memproduksi sektor 1. Kemudian tentukan juga baris transaksi input output pada daerah yang dicari dinotasikan U(1), yang menyatakan Jumlah output sektor 1 yang digunakan sebagai input produksi oleh seluruh sektor. Nilai X(1), V(1), dan U(1) diperoleh dari date sekunder. Dalam penelitian ini nilai U(1) dan V(1) dasarkan pada Z dari tabel input output asal, kemudian dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan kondisi perekonomian daerah yang ditaksir.
3. Tentukan kriteria kekonvergenan yang diinginkan, misalnya $\varepsilon \leq 0.00001$.
4. Tentukan $\boldsymbol{U^1} = \left[\boldsymbol{A(0)}\widehat{\boldsymbol{X}}\boldsymbol{(1)}\right]i$

Dimana

$$\boldsymbol{X(1)} = \begin{bmatrix} X_1(1) & 0 & 0 \\ 0 & X_2(1) & 0 \\ 0 & 0 & X_3(1) \end{bmatrix}, i = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Bandingkan nilai U1 dengan U(1), yang diharapkan adalah $\left|\text{U1-U(1)}\right| \leq \varepsilon$. Jika kondisi tersebut tidak terjadi maka harus dilakukan penyesuaian melalui

$R(1) = \left[\widehat{U}(1)\right]\left[\widehat{U}^1\right]^{-1}$

5. Estimasi matriks teknologi $A_1 = R_1 A(0)$
6. Tentukan $\boldsymbol{V^1} = \boldsymbol{i'}[\boldsymbol{A^1 X(1)}]$

Bandingkan nilai V1 dengan V(1), yang diharapkan adalah $\left|\text{V1-V(1)}\right| \leq \varepsilon$. Jika kondisi tersebut tidak terjadi maka harus dilakukan penyesuaian melalui $S(1) = \left[\hat{V}(1)\right]\left[\hat{V}^1\right]^{-1}$

7. Estimasi matriks teknologi yaitu $A_2 = A_1 S_1 = R_1 A(0) S_1$

8. Lakukan iterasi sampai kriteria konvergen ditemukan.